

Judul : KPK Percepat Penyidikan Setya Novanto
Tanggal : Selasa, 21 November 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1

KPK PERCEPAT PENYIDIKAN SETYA NOVANTO

Penyidik mengusut keterlibatan keluarga Setya dalam korupsi e-KTP.

JAKARTA — Setelah memasuki Setya Novanto ke tahanan, Komisi Pemberantasan Korupsi menggenjot proses hukum tersangka kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP tersebut. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan awal terhadap Setya sebagai tersangka.

Menurut Febri, penyidik melaksanakan tugas itu setelah mendapat pertimbangan dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa Setya siap secara fisik dan psikis untuk menjalani pemeriksaan. "Penyidik sudah menyampaikan hak-hak dia sebagai tersangka dan perkara yang disangkakan," kata Febri di Jakarta, kemarin.

Proses hukum perkara Setya terhambat karena Ketua Umum Partai Golkar ini mangkir dari panggilan pada Rabu lalu. Setya menghilang ketika KPK hendak menangkapnya pada Rabu malam. Belakangan, Setya dikabarkan mengalami "kecelakaan" di Jalan Permata Berlian, Jakarta. Setya sempat dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Komisi antikorupsi memindahkan Setya ke sel pada Jumat malam lalu.

Febri mengatakan KPK hendak mempercepat proses penyidikan Setya ke tingkat penuntutan. Namun dia

menampik anggapan bahwa percepatan itu bertujuan menghindari gugatan praperadilan kedua Setya, yang sidangnya akan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 November mendatang. Adapun jaksa kasus e-KTP, Abdul Basir, mengatakan belum tahu kapan perkara Setya masuk tahap penuntutan. "Sekarang masih dalam tahap penyidikan," kata dia.

Demi mempercepat penyidikan pula, KPK memeriksa istri Setya, Deisti Astriani Tagor, kemarin. Deisti diperiksa hampir delapan jam sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo. Selepas pemeriksaan, Deisti tak menjawab pertanyaan wartawan.

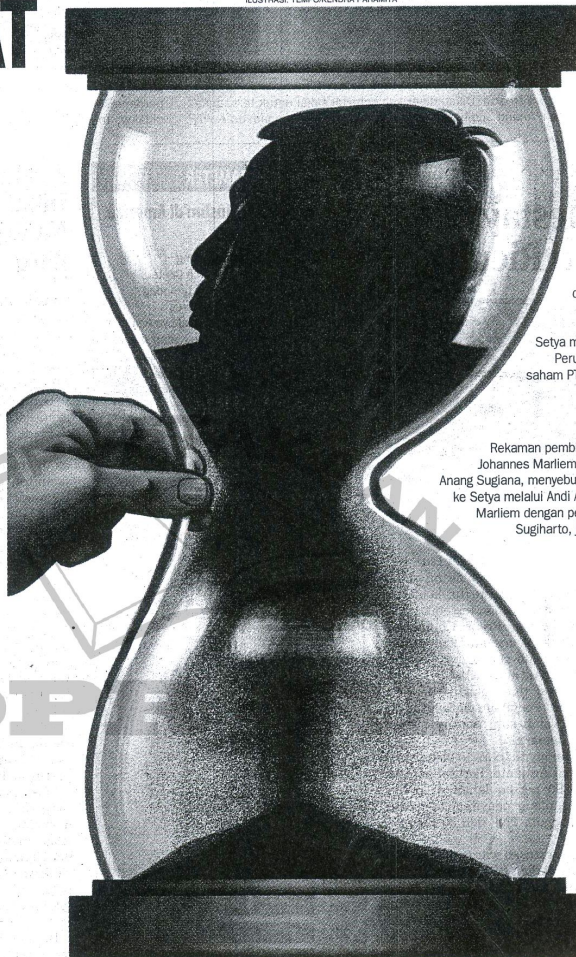
Menurut Febri, Deisti diperiksa untuk mendetailkan kronologi kepemilikan saham di PT Mondialindo Graha Pradana dan PT Murakabi Sejahtera. Dalam sidang dua pekan lalu, bekas Direktur Utama PT Mondialindo dan PT Murakabi, Deniarto Suhartono, mengungkap kepemilikan saham istri dan anak Setya di kedua perusahaan itu.

Menurut Febri, penyidik KPK berusaha mengungkap riwayat kepemilikan perusahaan tersebut. Selain itu, dia menambahkan, penyidik ingin melihat keterkaitan beberapa perusahaan, kepemilikan saham, proses distribusi, dan

perpindahan saham. "Nama saksi juga tercantum di dalam salah satu perusahaan lain dengan jabatan yang cukup tinggi dan kuat," ucapnya.

Kuasa hukum Setya, Fredrich Yunadi, mengatakan penyidik belum berhasil mengajukan pertanyaan mengenai

ILUSTRASI: TEMPOKENORA PARAMITA



Bukti Dugaan Peran Setya

Penyidik KPK telah mengantongi sejumlah informasi dan bukti dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Penyidik pun telah memiliki informasi aliran dana dalam perkara ini. Tapi Setya membantah semua tuduhan itu. Berikut ini di antaranya:

Perusahaan di Sekitar Proyek

PT Mondialindo Graha Perdana dan PT Murakabi Sejahtera diduga berkaitan dengan Setya dan keluarganya. Pada 2000-2002, Setya menjadi komisaris PT Mondialindo. Perusahaan ini memegang 42 persen saham PT Murakabi Sejahtera—salah satu peserta tender proyek e-KTP.

Rekaman Pembicaraan

Rekaman pembicaraan Direktur Blomorf Lone LLC, Johannes Marliem, dengan bos PT Quadra Solution, Anang Sugiana, menyebutkan awal adanya pemberian duit ke Setya melalui Andi Agustinus. Rekaman pembicaraan Marliem dengan pejabat pembuat komitmen proyek, Sugiharto, juga mengungkap rencana pemberian Rp 60 miliar kepada Setya.

Dokumen Penyidik Amerika Serikat

Lembara investigasi federal Amerika Serikat, FBI, menduga Setya menerima jam tangan mewah merek Richard Mille seharga Rp 1,82 miliar dari Marliem. Setya juga diduga meminta "diskon" Rp 2.000 per kartu dari harga Rp 5.000 yang harus dibayar pemerintah.

Catatan Tangan Pembagian Fee

Andi bersama Sugiharto pernah membuat catatan tangan untuk membagi jatah fee para aktor korupsi proyek senilai Rp 5,84 triliun ini. Nama Setya tercatat bersama Andi mendapat jatah Rp 572,4 miliar.

Keterangan dalam Persidangan

Setidaknya ada lima keterangan yang saling menguatkan. Di antaranya keterangan terdakwa Imran dan Sugiharto, juga keterangan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraeni. Mereka mengaku pernah bertemu dengan Setya dan Andi di Gran Melia untuk membahas proyek e-KTP.

**Politikus Golkar
Siap Berebut
Kursi Ketua DPR**

Halaman 4

● FAJAR PERBANTO | ARKHELAUS WISNU |
FRANSISCO

● FRANSISCO ROSARIANS